**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN  
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN  
TANGERANG SELATAN**



# KARYA TULIS TUGAS AKHIR

**\*TINJAUAN PENGENAAN PPN EKONOMI DIGITAL**

**PADA GRAB DI KPP MADYA JAKARTA SELATAN I**

Diajukan oleh:

SUGENG WAHYUDI  
NPM: 2301181164

Mahasiswa Program Studi Diploma III Pajak Alih Program

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat

Dinyatakan Lulus Program Studi Diploma III Pajak Alih Program

Tahun 2020

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

**TANGERANG SELATAN**

# PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA | : | SUGENG WAHYUDI |
| NOMOR POKOK MAHASISWA | : | 2301181164 |
| PROGRAM STUDI | : | DIPLOMA III PAJAK |
| JURUSAN | : | PAJAK |
| BIDANG STUDI | : | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
| JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR | : | TINJAUAN PENGENAAN PPN EKONOMI DIGITAL PADA GRAB DI KPP MADYA JAKARTA SELATAN I |

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui, Ketua Jurusan Pajak  Fadlil Usman, Ak., M.Acc., CA  NIP 196210101983021001 | Menyetujui,  Dosen Pembimbing  Suparna Wijaya, SE, Ak, MM, CPA, CTA, CLI, BKP  NIP 19820113 200212 1 001 |

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

**TANGERANG SELATAN**

# PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA | : | SUGENG WAHYUDI |
| NOMOR POKOK MAHASISWA | : | 2301181164 |
| PROGRAM STUDI | : | DIPLOMA III PAJAK |
| JURUSAN | : | PAJAK |
| BIDANG STUDI | : | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
| JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR | : | TINJAUAN PENGENAAN PPN EKONOMI DIGITAL PADA GRAB DI KPP MADYA JAKARTA SELATAN I |

Tangerang Selatan, (dd month) 2020

1. …………………….. (Dosen Penilai I/Pembimbing)

Suparna Wijaya, SE, Ak, MM, CPA, CTA, CLI, BKP

NIP 19820113 200212 1 001

1. …………………….. (Dosen Penilai II)

Nama Nama

NIP

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN**

**POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN**

**TANGERANG SELATAN**

# PERNYATAAN KEASLIAN

KARYA TULIS TUGAS AKHIR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAMA | : | SUGENG WAHYUDI |
| NOMOR POKOK MAHASISWA | : | 2301181164 |
| PROGRAM STUDI | : | DIPLOMA III PAJAK |
| JURUSAN | : | PAJAK |
| BIDANG STUDI | : | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI |
| JUDUL KARYA TULIS TUGAS AKHIR | : | TINJAUAN PENGENAAN PPN EKONOMI DIGITAL PADA GRAB DI KPP MADYA JAKARTA SELATAN I |

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme, saya siap dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.

Tangerang Selatan, 2020

Yang memberi pernyataan,

Materai 6000

Sugeng Wahyudi

NPM 2301181164

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN PENGENAAN PPN EKONOMI DIGITAL PADA GRAB DI KPP MADYA JAKARTA SELATAN I”** ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Al -Amin, Nabi Muhammad Shallallahu’alaihu wassalam yang telah menyempurnakkan akhlaq umat manusia, semoga safaat beliau senantiasa tercurah hingga akhir zaman.

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari banyak pihak. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Lasiman dan Ibu Ngadinah selaku orang tua penulis serta Sri Suparyati selaku kakak penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Rahmadi Murwanti, Ak.,Acc ,Ph.D., selaku Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN
3. Bapak Agus Bandiyono….selaku ketua Jurusan Pajak Politeknik Keuangan Negara STAN
4. Bapak Suparna Wijaya, S.R., M.M., CLI, CTA, BKP selaku dosen pembimbing dan penilai I yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan totalitas.
5. Dosen penilai II
6. Dosen dan pengajar di Politeknik Keuangan Negara STAN yang telah mengajar dan mendidik penulis selama perkuliahan di kampus
7. Teman-teman angkatan
8. Pihak diwawancara/kantor.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untuk menjadikan karya tulis ini lebih baik serta meningkatakan kemampuan dan wawasan penulis. Semoga Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan Kementerian Keuangan.

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarakatuh.

Tangerang Selatan, 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

(Daftar isi disesuaikan dengan cara melakukan *update table* secara otomatis)

[KARYA TULIS TUGAS AKHIR i](#_Toc7797820)

[PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR ii](#_Toc7797821)

[PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI KARYA TULIS TUGAS AKHIR iii](#_Toc7797822)

[PERNYATAAN KEASLIAN iv](#_Toc7797823)

[KATA PENGANTAR v](#_Toc7797824)

[DAFTAR ISI vi](#_Toc7797825)

[DAFTAR GAMBAR ix](#_Toc7797826)

[DAFTAR TABEL x](#_Toc7797827)

[DAFTAR LAMPIRAN xi](#_Toc7797828)

[BAB I 1](#_Toc7797829)

[A. Latar Belakang Penulisan 1](#_Toc7797830)

[B. Ruang Lingkup Pembahasan 1](#_Toc7797831)

[C. Tujuan Penulisan 1](#_Toc7797832)

[D. Metode Pengumpulan Data 1](#_Toc7797833)

[E. Sistematika Penulisan 1](#_Toc7797834)

[BAB II 3](#_Toc7797835)

[A. Data dan Fakta Organisasi 3](#_Toc7797836)

[1. Direktorat Jenderal Pajak. 3](#_Toc7797837)

[2. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 4](#_Toc7797838)

[B. Kegiatan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 4](#_Toc7797839)

[1. Program kerja dan Indikator Kinerja Utama tahun 2015 4](#_Toc7797840)

[C. Pedoman penyuluhan perpajakan 4](#_Toc7797841)

[1. Tata cara penyelenggaraan kegiatan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak. 4](#_Toc7797842)

[2. Strategi kegiatan penyuluhan perpajakan 4](#_Toc7797843)

[3. Tema kegiatan penyuluhan perpajakan tahun 2015 4](#_Toc7797844)

[4. Peningkatan efektifitas pelaksanaan penyuluhan perpajakan tahun 2015 4](#_Toc7797845)

[BAB III 5](#_Toc7797846)

[A. Landasan Teori 5](#_Toc7797847)

[1. Program tahun pembinaan Wajib Pajak 2015. 5](#_Toc7797848)

[2. Hubungan masyarakat dalam lembaga pemerintahan. 6](#_Toc7797849)

[3. Pelayanan public. 6](#_Toc7797850)

[B. Tinjauan Umum Peran Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat pada Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 6](#_Toc7797851)

[1. Perencanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. 6](#_Toc7797852)

[2. Pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. 6](#_Toc7797853)

[3. Pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. 7](#_Toc7797854)

[4. Hambatan dan permasalahan. 8](#_Toc7797855)

[5. Solusi dan penyelesaian. 8](#_Toc7797856)

[6. Hasil pelaksanaan program. 8](#_Toc7797857)

[BAB IV 9](#_Toc7797858)

[A. Simpulan 9](#_Toc7797859)

[B. Saran 10](#_Toc7797860)

[DAFTAR PUSTAKA 11](#_Toc7797861)

[LAMPIRAN 14](#_Toc7797862)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar III.1 7](#_Toc454473315)

# DAFTAR TABEL

[Tabel III.1 6](#_Toc454473418)

# DAFTAR LAMPIRAN

# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penulisan

Berdasarkan kajian Google-A.T Kearney tahun 2017, sebanyak US$ 3 miliar dolar Amerika Serikat investasi asing mengalir untuk bisnis digital di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2019, sudah ada 5 *Unicorn* yang ada yaitu Gojek, Tokopedia, OVO, Traveloka, dan Bukalapak (Franedya 2019). Menurut laporan e-Conomy SEA (Google Temasek 2018), ekonomi digital Indonesia terbesar dan memiliki pertumbuhan yang tercepat se-Asia Tenggara yaitu sebesar US$27 milliar atau Rp391 triliun dan diprediksikan mencapai US$100 pada tahun 2025.

Laporan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2018 mengungkapkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 64% yaitu 171,17 juta jiwa dari total populasi penduduk 264,16 juta jiwa. Selain jumlah penduduk Indonesia yang besar, secara nasional Indonesia mempunyai Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dibandingkan negara-negara lainya di kawasan Asia Tenggara yaitu sebesar Rp14.837 triliun (Kusnandar 2019). Dengan potensi yang besar, ekonomi digital Indonesia akan berkembang dengan mulai bermunculanya perusahaan rintisan berbasis digital.

Bisnis yang berbasiskan internet atau disebut ekonomi digital didefinisikan sebagai “*the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any internet initiative as medium of exchange*” (Hartman S 2000). Sesuai dengan definisi

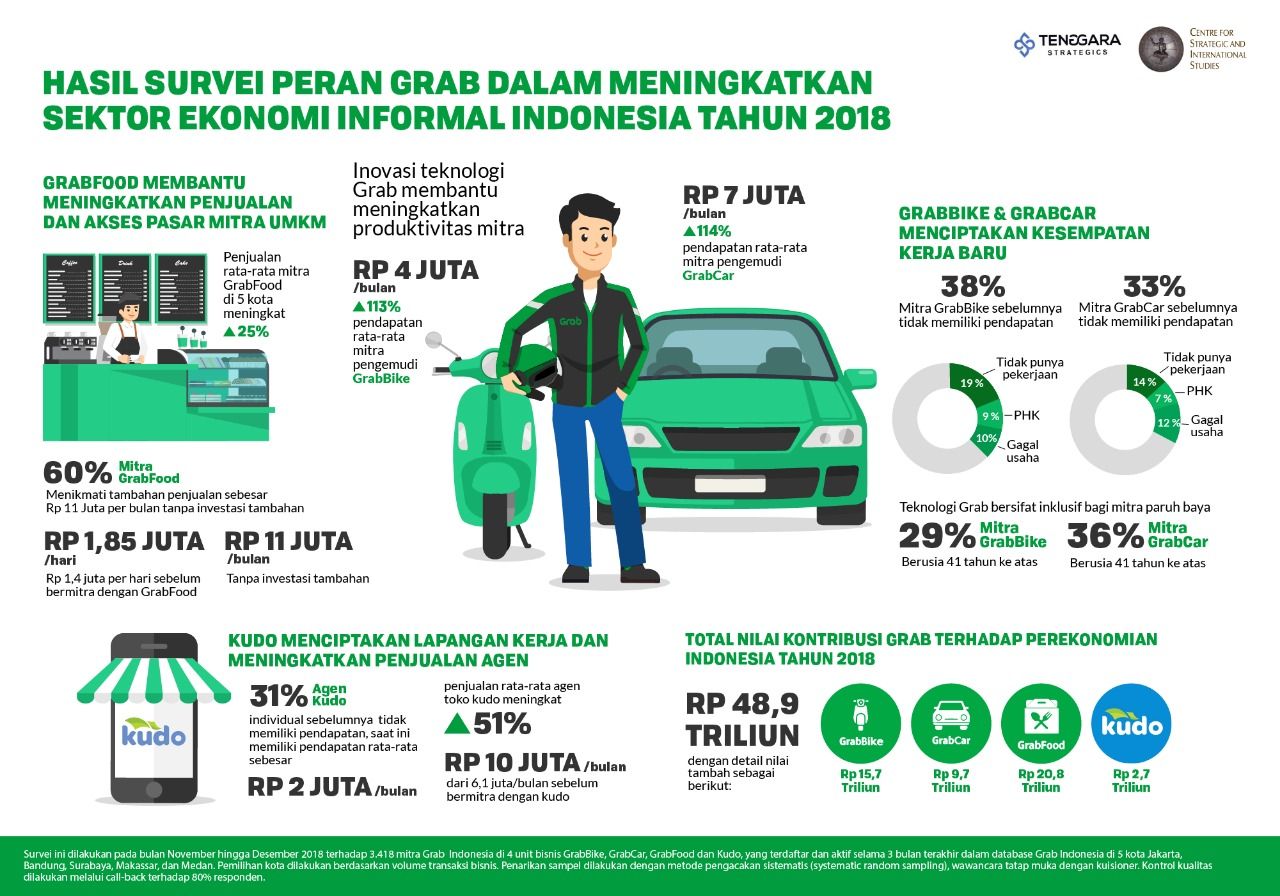
tersebut, ekonomi digital memanfaatkan internet sebagai tempat bisnis, produk dibuat dan dipertukarkan dengan medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau pun antar individu.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri 4.0, tidak bisa dipungkiri ekonomi digital akan semakin berkembang di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia merupakan pasar yang strategis bagi berbagai penjual baik dalam maupun luar negeri. Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia menyampaiakan bahwa kebangkitan ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 130 miliar pada 2020 (ANTARA 2018). Ekonomi digital menjadi peluang yang menjanjikan bagi Indonesia. Tahun 2017 ekonomi digital memberikan kontribusi 7,1% PDB Indonesia, lebih besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya 5,1%. Laporan lembaga riset McKinsey memperkirakan potensi ekonomi digital Indonesia dapat mencapai USD 65 milliar pada tahun 2022 (Kementerian Sekretaris Negara 2019).

Tahun 2015 merupakan awal perkembangan ekonomi digital berbasis ojek online di Indonesia. Grab secara resmi masuk di Indonesia dengan Grabtaxi pada Juli 2014, dan meluncurkan layanan Grabbikenya 4 bulan setelah Gojek merilis aplikasi pemesananya pada 7 Januari 2015 (Pratama 2015). Ojek online pada awal kehadiranya mendapatkan banyak penolakan dari ojek pangkalan dan pengusaha taksi offline. Namun, promo besar-besaran membuat pelanggan lebih tertarik menggunakan ojek online yang murah, dan mudah. Perkembangan teknologi yang tak terbendung membuat ojek online menjadi pilihan utama masyarakat dalam beraktivitas.

Grab sebagai perusahaan *Online-to-Offline* (O2O) *mobile platform* mengembangkan layanannya tidak hanya terbatas pada layanan antar perjalanan. Grab menyediakan layanan kebutuhan sehari-hari bagi para pelangganya seperti pesan-antar makanan, pengiriman barang, pembelian tiket dan pembayaran.

Seiring dengan berkembangnya Grab dari tahun-ketahun, tanpa disadari ternyata Grab memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar Rp48,9 triliun pada 2018 (Tenggara Strategic & Centre For Strategic and Internasional Studies 2018). Dari berbagai layanan yang disediakan, Grabfood menjadi layanan penyumbang perekonomian paling besar, yaitu Rp20,8 trilliun. Selain itu, CSIS-Tenggara Strategic menyimpulkan bahwa Grab memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ekonomi informal Indonesia yaitu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan penjualan UMKM dan meningkatkan pendapatan mayoritas mitra GrabBike 113% diatas rata-rata pendapatan mereka sebelum menjadi pengendara ojek online seperti pada gambar berikut.



Grab secara resmi mengumumkan pendapatan tahunan mereka mencapai US$ 1 miliar atau Rp13,9 triliun rupiah (CNN Indonesia 2018). Begitu besarnya pendapatan dan kontribusi Grab bagi perekonomian Indonesia secara tidak langsung mengindikasikan bahwa Grab setidaknya mempunyai aliran kas yang besar selain laba yang menjadi tujuan perusahaan. Sejalan dengan semakin besarnya aliran kas dan/atau laba perusahaan maka potensi perpajakan dari layanan yang disediakan Grab juga semakin besar.

Untuk merealisasikan potensi pajak ekonomi digital, Indonesia dapat mengambil ilmu dari negara lain yang sudah terlebih dahulu mengenakan pajak pada ekonomi digital. Tahun 2017, Australia mengenakan pajak atas penjualan jasa kena pajak dan produk digital dari luar negeri yang dikonsumsi oleh warga Australia. Otoritas Pajak Australia (ATO) mengenakan pajak bagi penjualan dari luar negeri yang melebihi A$ 75.000 dalam setahun. Penjual yang menjual langsung ke warga Australia wajib mendaftar dan mengenakan pajak, jika penjualan ke entitas bisnis yang memiliki Australian Bussiness Number (ABN) maka penjual tidak mengenakan pajak karena pajaknya akan dikenakan melalui entitas bisnis yg terdaftar di Australia tersebut. Sedangkan penjualan yang melalui penyedia distribusi eletronik seperti Appstore, Google Playstore pajaknya dikenakan melalui operator penyedia aplikasi tersebut (Australian Taxation Office 2017). Contoh tersebut mengambarkan bahwa Australia dapat mengenakan pajak atas ekonomi digital yang meliputi transaksi lintas batas negara. Grab yang merupakan cabang dan memiliki kantor di Indonesia lebih mudah pengenaan pajaknya karena Grab sudah jelas memiliki badan hukum atau perwakilan di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga tidak rumit lagi terkait yurisdiksi pengenaan pajaknya.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pada dasarnya mengatur semua transaksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai kecuali yang dikecualikan dalam Undang-Undang. Salah satu pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai mendefinisikan kendaraan yang termasuk angkutan umum (tidak dikenakan PPN) adalah kendaraan yang menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, sedangkan kendaraan Grab tidak demikian. Selain itu, Grab sebagai penyedia berbagai layanan pemenuhan kebutuhan harian mempunyai jutaan order setiap hari. Berawal dari fakta-fakta tersebut dan berdasarkan pengamatan penulis sampai saat ini belum ada aturan turunan yang mengatur pengenaan pajak terhadap ekonomi digital khususnya ojek online, penulis tertarik untuk melakukan tinjauan dilapangan terhadap pengenaan pajak ekonomi digital pada Grab.

## Ruang Lingkup Pembahasan

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka penulis menganggap perlu dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu meliputi pengenaan pajak pertambahan nilai ekonomi digital Grab Indonesia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I. Ruang lingkup yang dibahas dalam tugas akhir ini mengenai bagaimana pajak pertambahan nilai dikenakan terhadap transaksi yang menggunakan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Selain itu penulis menambahkan detail ruang lingkup pembahasan sebagai berikut.

1. Proses bisnis yang dijalankan oleh Grab di Indonesia.
2. Peraturan perpajakan terkait.
3. Praktik Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Grab Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Hambatan dan usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan pengenaan PPN pada Grab Indonesia.

## Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mendapatkan informasi proses bisnis Grab.
2. Mendapatkan informasi praktik pengenaan PPN ekonomi digital pada Grab.
3. Mendapatkan informasi perbandingan pengenaan PPN berdasarakan teori dan praktik di lapangan
4. Mendapatkan informasi hambatan pengenaan PPN pada ekonomi digital Grab.
5. Mengetahui tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan pengenaan PPN ekonomi digital pada Grab

## Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut.

### Metode Penelitian Kepustakaan

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan masalah atau topik yang menjadi objek penelitian. Informasi didapakan dari berbagai sumber seperti peraturan perundangan, buku, jurnal media masa dan sebagaianya terkait pekermbangan pengenaan pajak pertambahan nilai pada ekonomi digital.

### Metode Penelitian Lapangan

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi dengan cara melakukan tanya jawab kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I mengenai data dan informasi yang menjadi objek penelitian

## Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang yang menguraikan alasan-alasan, fenomena yang membuat penulis tertarik, tujuan dan metode yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian.

BAB II PERMASALAHAN

Bab ini akan berisi informasi mengenai gambaran umum ekonomi digital, Grab dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan . Selain itu, terdapat data dan fakta pelaksanaan PPN ekonomi digital Grab yang sudah dilakukan.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan berisi landasan teori, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi digital, kerangka berpikir dan analisis mengenai data dan fakta untuk menjawab tujuan penulisan.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

# BAB II

**DATA DAN FAKTA**

## Data dan Fakta Organisasi

### Grab Indonesia (PT. Solusi Transportasi Indonesia )

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### KPP Madya Jakarta Selatan I

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

## Proses Bisnis Grab Indonesia

### Perjanjian Grab dengan Mitra (Driver dan Resto)

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)\

### Penyerahan Jasa Grab

## Praktik Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Grab

### Jasa Terhutang PPN

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Pembuatan Faktur Pajak

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Pengawasan atas Penyerahan Grab

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

# BAB III

**LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN**

## Landasan Teori

### Peraturan Perpajakan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah
   1. Pasal 4 dan 4A

Sesuai dengan perinsip

### Hubungan masyarakat dalam lembaga pemerintahan.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Pelayanan public.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

## Tinjauan Umum Peran Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat pada Program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Perencanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab).

Contoh format tabel :

Tabel III.1

**Data Permohonan PMK-91/PMK.03/2015**

Per tanggal 29 April 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2015** | **2016** |
| Jumlah Wajib Pajak Badan | 2.437.501 | 2.684.345 |
| Jumlah Permohonan PMK-91/PMK.03/2015 | 39.707 | 57.158 |
| Persentase permohonan | 1,63% | 2,13% |
| Jumlah yang di setujui | 9.828 | 14.263 |
| Persentase permohonan yang disetujui | 24,75% | 24,95% |

Sumber : Data Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

### Pelaksanaan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 pada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

Contoh gambar :

Gambar III.1

**Logo Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015**



Sumber : website resmi Direktorat Jenderal Pajak

**Ketentuan Gambar atau Tabel :**

1. Setiap tabel dan/atau gambar harus berisi satu jenis informasi saja, dan hendaknya dilakukan sesingkat dan sesederhana mungkin
2. Tabel dan gambar beserta judul dan sumbernya tidak boleh terpotong oleh halaman. Sebaliknya, halaman yang berisi tabel dan gambar harus tetap penuh sesuai dengan ketentuan marjin atas dan bawah.
3. Tabel atau gambar beserta judul dan sumbernya tidak boleh melebihi 75% dari suatu halaman. Apabila jumlah tabel dan ilustrasinya banyak atau terlalu kompleks, tempatkan pada lampiran dan bukan dalam teks
4. Tabel atau gambar yang berhubungan langsung dengan paragraph, sebaiknya ditampilkan. Sementara, untuk table atau gambar yang tidak berhubungan langsung (hanya sebagai data tambahan) tempatkan pada lampiran.
5. Tempatkan tabel dan gambar sedekat mungkin dengan uraian di dalam teks, tetapi tabel dan gambar tersebut tidak boleh mendahului uraiannya
6. Uraian mengenai isi tabel hendaknya tidak bertele-tele, dan tabel itu sendiri hendaknya dibuat sejelas mungkin

### Hambatan dan permasalahan.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Solusi dan penyelesaian.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

### Hasil pelaksanaan program.

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab)

# BAB IV

**PENUTUP**

## Simpulan

1. (Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab).

## Saran

(Enter your text here and change the sub bab or sub sub bab).

# DAFTAR PUSTAKA

Contoh :

* + 1. **Buku dan atau Sumber Lainnya**

Ardianto, Elvinardo. 2011. *Handbook of Public Relations*, *Pengantar Komprehensif*.Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fisher, Ronald C. 1999. “*Tax Amnesty*”. Dalam Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel dan Jane Gravelle. 1999. *The Encyclopedia of Taxation and Tax Policy*. Urban Institute Press.

James, Simons R. 2012. *A Dictionary of Taxation.* Cheltenham: Edward Eigar Publisher.

Lattimore. 2010. *Public Relations, Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Lubis, Evawani Elysa. 2012. “Peran Humas dalam Membentuk Citra Pemerintah”.Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12 (1). Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Moore, Frazier. 2004. *Humas : Membangun Citra dengan Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soemirat, Sholeh dan Elvinardo Ardianto. 2003***.*** *Dasar-Dasar Public Relations,* Bandung:Remaja Rosdakarya.

Arvani. 2015. “Dirjen Pajak Hapus Sanksi Pajak Tahun Ini”. Dalam *Inside Tax Magazine* edisi 31, 31 Mei 2015. Jakarta

Budiarto, Estu. 2015. “Pengampunan Pajak di Tahun Pembinaan”. Dalam *Inside Tax Magazine* edisi 31, 31 Mei 2015. Jakarta

Irawan. 2015. “Dukung Program Tahun Pembinaan 2015”. Dalam *Inside Tax Magazine* edisi 31, 31 Mei 2015. Jakarta

Sasmita, Suryadi. 2015. “*Reinventing Policy* Perlu Sosialisasi Secara Maraton”. Dalam *Inside Tax Magazine* edisi 31, 31 Mei 2015. Jakarta

Tobing, Ganda C, Gallantino Farman dan Dienda Khairani. 2015. “Pahami dan Manfaatkan *Reinventing Policy*”. Dalam *Inside Tax Magazine* edisi 31, 31 Mei 2015. Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. http://www.pajak.go.id/artikel-tpwp

APBN News. <http://apbnnews.com/kawal-apbn/tahun-pembinaan-wajib-pajak/> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2018 pukul 20.34 WIB)

* + 1. **Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2009, tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009, tentang *Pelayanan Publik*

Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2008, tentang *Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007*

Peraturan Menteri Keuangan No.66/PMK.03/2008, tentang *Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*

Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.01/2015, tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*

Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, tentang *Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009*

Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.03/2015, tentang *Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak*obing

Peraturan Menteri Keuangan No.191/PMK.010/2015, tentang *Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016*

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-03/PJ/2013, tentang *Pedoman Penyuluhan Perpajakan*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-41/PJ/2012, tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Kehumasan Direktorat Jenderal Pajak*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-05/PJ/2013, tentang *Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-40/PJ/2015, tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak*

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-53/PJ/2015, tentang *Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 untuk Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak*

Instruksi Direktur Jenderal Pajak No.INS-04/PJ/2015, tentang *Penyelesaian Pemeriksaan Khusus Melalui Penghentian Pemeriksaan dengan Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir Sebelum Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak*

Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat No.S-971/PJ.09/2014, tentang *Tema Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Tahun 2015*

Surat Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat No.S-150/PJ.09/2015, tentang *Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Penyuluhan Perpajakan Tahun 2015*

# LAMPIRAN

Ketentuan :

1. Daftar gambar disertakan apabila terdapat lebih dari dua gambar, apabila terdapat kurang dari tiga gambar dicantumkan dalam daftar lampiran.
2. Daftar tabel disertakan apabila terdapat lebih dari dua tabel, apabila terdapat kurang dari tiga tabel dilampirkan dalam daftar lampiran.
3. Apabila ada tabel dan atau gambar yang memiliki ilustrasi yang kompleks, hendaknya dimasukkan ke dalam lampiran dan bukan ke dalam teks
4. Hendaknya suatu gambar dan/atau tabel tidak melebihi 75% dari suatu halaman.